

**IMPLEMENTASI KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD)
SEBAGAI INSTRUMEN PEMBAYARAN NON TUNAI
DI KABUPATEN KATINGAN**

**DIAN RETNO PERTIWI
NIM. 2420333320014**



**PROGRAM STUDI
MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

TESIS

**IMPLEMENTASI KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD)
SEBAGAI INSTRUMEN PEMBAYARAN NON TUNAI
DI KABUPATEN KATINGAN**

**DIAN RETNO PERTIWI
NIM. 2420333320014**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Akuntansi

**PROGRAM STUDI
MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

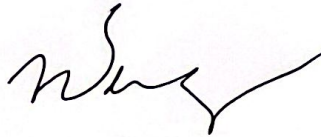
LEMBAR PERSETUJUAN

JUDUL TESIS : **IMPLEMENTASI KARTU KREDIT PEMERINTAH
DAERAH (KKPD) SEBAGAI INSTRUMEN
PEMBAYARAN NON TUNAI DI KABUPATEN
KATINGAN**

NAMA : **DIAN RETNO PERTIWI**

NIM : **2420333320014**

Telah disetujui oleh:
Pembimbing,



Dr. Novita Weningtyas Respati, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19751118 200312 2 001

diketahui,
Koordinator Program Studi Magister Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Chairina, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS, CSP
NIP. 19781012 200312 2 003

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD) SEBAGAI INSTRUMEN PEMBAYARAN NON TUNAI DI KABUPATEN KATINGAN

Tesis

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Dian Retno Pertiwi
2420333320014

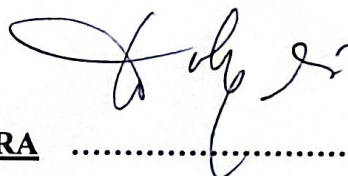
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis dan dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi (M.Ak.)

Pada tanggal 6 Juli 2026

Susunan Tim Penguji:

Ketua

Dr. Wahyudin Nor, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS, CSRA
NIP. 19751115 199903 1 002



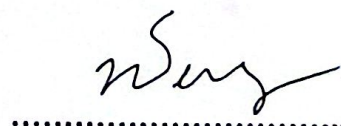
Sekretaris,

Dr. Hj. Ade Adriani, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19701204 199502 2 001



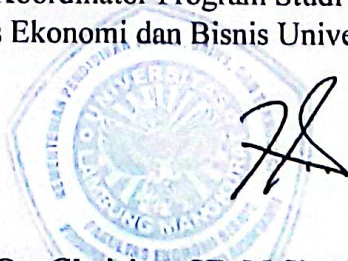
Pembimbing,

Dr. Novita Weningtyas Respati, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19751118 200312 2 001



diketahui,

Koordinator Program Studi Magister Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Chairina, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS, CSP
NIP. 19781012 200312 2 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Kotak Pos 219 Banjarmasin

Telp (0511) 3305116–3306654, Fax (0511) 3306654

PERSETUJUAN PERBAIKAN TESIS

Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Akuntansi Universitas Lambung Mangkurat menyatakan bahwa:

NAMA : Dian Retno Pertiwi
NIM : 2420333320014
JUDUL TESIS : IMPLEMENTASI KARTU KREDIT PEMERINTAH
DAERAH (KKPD) SEBAGAI INSTRUMEN PEMBAYARAN
NON TUNAI DI KABUPATEN KATINGAN
HARI/TANGGAL : Senin, 6 Juli 2026

Telah menyelesaikan perbaikan sesuai dengan yang disarankan. Hal-hal yang diperbaiki tercantum dalam lampiran persetujuan ini.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Wahyudin Nor, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS, CSRA	Ketua	
2.	Dr. Hj. Ade Adriani, SE, M.Si, Ak, CA	Sekretaris	
3.	Dr. Novita Weningtyas Respati, SE, M.Si, Ak, CA	Pembimbing	

Banjarmasin,

Juli 2026

Telah disetujui oleh:
Pembimbing,

Dr. Novita Weningtyas Respati, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19751118 200312 2 001

diketahui,

Koordinator Program Studi Magister Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat

Dr. Chairina, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS, CSP
NIP. 19781012 200312 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dian Retno Pertiwi
NIM : 2420333320014
Program Studi : Magister Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat
Judul : **“IMPLEMENTASI KARTU KREDIT
PEMERINTAH DAERAH (KKPD) SEBAGAI
INSTRUMEN PEMBAYARAN NON TUNAI DI
KABUPATEN KATINGAN”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali dicantumkan sebagai kutipan/acuan dalam naskah dengan disebutkan kutipan/acuan. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan, plagiat maupun manipulasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dari siapapun.

Banjarmasin, 17 Juli 2026
Yang membuat pernyataan,



(DIAN RETNO PERTIWI)
NIM. 2420333320014

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan-Nya, sehingga tesis yang berjudul **“Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai Instrumen Pembayaran Non Tunai di Kabupaten Katingan”** ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE, M.Si., selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Dr. Ir. Achmad Yunani, SE, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu Dr. Chairina, SE, M.Si., Ak., CA., CSRS., CSP., selaku Koordinator Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat beserta jajarannya;
4. Ibu Dr. Novita Weningtyas Respati, SE, M.Si., Ak., CA., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, motivasi, serta bimbingan yang sangat berarti selama proses penyusunan tesis ini;
5. Bapak Dr. Wahyudin Nor, SE, M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA., selaku Ketua Tim Penguji dan Ibu Dr. Hj. Ade Adriani, SE, M.Si., Ak., CA., selaku Sekretaris Tim Penguji yang telah memberikan saran, masukan, dan arahan yang sangat bermanfaat dalam penyempurnaan tesis ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman selama penulis menempuh Pendidikan;
7. Pemerintah Kabupaten Katingan, khususnya rekan-rekan di Bidang Perbendaharaan, para informan dari BKAD, Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Inspektorat Kabupaten Katingan yang telah meluangkan waktu,

memberikan dokumen, informasi, dan berbagai klarifikasi selama proses penelitian. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Efri, Bapak Erra dan Bapak Dwi dari Bank Kalteng atas bantuan, kerja sama, serta kesediaannya memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini;

8. Kepada Papa atas dukungan dalam pembiayaan studi yang telah meringankan langkah penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini dan kepada Mama atas segala hal sederhana yang sering kali tidak terlihat namun sangat berarti, hingga memastikan penulis dapat menjalani perkuliahan dengan tenang. Setiap bentuk dukungan tersebut menjadi bagian penting yang mengantarkan penulis hingga menyelesaikan tesis ini;
9. Suami tercinta, Agung Asa Buana, yang dengan tulus mendukung tanpa henti. Terima kasih telah menjadi pasangan yang selalu percaya pada kemampuan penulis, memberikan ruang bagi penulis untuk melanjutkan pendidikan, serta mengambil peran yang lebih besar dalam mendampingi kedua putra tercinta, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan hati yang tenang, serta;
10. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi Angkatan 2024 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat serta semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan penelitian ini pada masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi sektor publik serta pengelolaan keuangan daerah.

Banjarmasin, Juli 2026

Dian Retno Pertiwi

ABSTRAK

Dian Retno Pertiwi. 2026. Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagai Instrumen Pembayaran Non Tunai di Kabupaten Katingan. Pembimbing: Dr. Novita Weningtyas Respati, S.E., M.Si., Ak., CA.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 mengatur penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai instrumen pembayaran non tunai dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Kabupaten Katingan menindaklanjuti kebijakan tersebut melalui penerbitan Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2024 dan penetapan enam perangkat daerah sebagai *pilot project* implementasi KKPD. Meskipun berbagai instrumen administratif telah dibentuk, implementasi operasional KKPD belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi KKPD pada Pemerintah Kabupaten Katingan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya berdasarkan teori implementasi kebijakan Edwards III.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal pada Pemerintah Kabupaten Katingan. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, analisis dokumen, dan triangulasi sumber. Analisis data dilakukan menggunakan teknik *pattern matching* dengan membandingkan ketentuan normatif implementasi KKPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 dengan kondisi empiris di lapangan. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan Edwards III, sedangkan *Institutional Theory* digunakan untuk menginterpretasikan temuan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Katingan telah memenuhi sebagian besar persyaratan administratif implementasi KKPD melalui penerbitan Peraturan Bupati, kerja sama dengan bank penerbit, penetapan perangkat daerah *pilot project*, penerbitan kartu KKPD, dan pengalokasian Uang Persediaan (UP) KKPD. Akan tetapi, implementasi operasional KKPD belum terlaksana karena belum terdapat transaksi belanja menggunakan KKPD pada perangkat daerah *pilot project*. Hambatan implementasi dipengaruhi oleh interaksi faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Perspektif *Institutional Theory* menunjukkan bahwa tekanan institusional telah mendorong terbentuknya kepatuhan administratif, tetapi belum menghasilkan perubahan praktik operasional (*decoupling*). Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat implementasi KKPD melalui penyusunan pedoman operasional, peningkatan kapasitas pelaksana, dukungan organisasi, serta monitoring dan evaluasi secara berkala agar implementasi administratif dapat berkembang menjadi implementasi operasional.

Kata Kunci: Kartu Kredit Pemerintah Daerah implementasi kebijakan; Edwards III; teori kelembagaan; pemerintah daerah; *pattern matching*; penelitian kualitatif.

ABSTRACT

Dian Retno Pertiwi. 2026. Implementation of Regional Government Credit Cards as a Cashless Payment Instrument in Katingan Regency. Advisor: Dr. Novita Weningtyas Respati, S.E., M.Si., Ak., CA.

Keywords: Regional Government Credit Card; policy implementation; Edwards III; institutional theory; local government; pattern matching; qualitative research.

The digitalization of public financial management has driven governments to adopt various digital payment instruments to enhance transparency, accountability, efficiency, and control over local government financial transactions. The Regional Government Credit Card (*Kartu Kredit Pemerintah Daerah/KKPD*) is one of the instruments developed to support these objectives. However, the implementation of KKPD in local governments still faces a gap between administrative readiness and operational execution. This study aims to analyze the implementation of KKPD in the Katingan Regency Government and identify the factors influencing its implementation based on Edwards III's policy implementation theory.

This study employed a qualitative single-case study approach within the Katingan Regency Government. Data were gathered through semi-structured interviews, document analysis, and source triangulation. Data analysis was conducted using the pattern matching technique, comparing the normative provisions of KKPD implementation based on the Minister of Home Affairs Regulation Number 79 of 2022 with empirical conditions in the field. The analysis was performed using Edwards III's policy implementation theory, with Institutional Theory as a complementary perspective for interpreting the research findings.

The results of the study indicate that the Katingan Regency Government has met most of the administrative requirements for KKPD implementation through the issuance of Regency Regulations, collaboration with the issuing bank, designation of pilot regional apparatuses, issuance of KKPD cards, and allocation of KKPD revolving funds. However, the operational implementation of KKPD has not yet been realized, as there have been no expenditure transactions using KKPD within the pilot regional apparatuses. Implementation constraints are influenced by the interaction among communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. The institutional theory perspective suggests that institutional pressures have driven administrative compliance but have not yet led to changes in operational practice (*decoupling*). The practical implications of these findings suggest that the implementation of KKPD requires the formulation of clear operational guidelines, supported by socialization, enhancing the capacity of implementers, providing organizational support, and conducting regular monitoring and evaluation so that administrative implementation can evolve into operational implementation.

Banjarmasin, July 15, 2026

Approved by:

Head of Language Center



Dr. Hj. Noor Eka Chandra, M.Pd
NIP. 197710232001122003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
UPA BAHASA ULM

Jalan Brigjen H. Hasan Basry Kotak Pos 70123 Banjarmasin
Telepon/Fax.: (0511) 3308140
Email: uptbahasa@ulm.ac.id

SURAT KETERANGAN

NO: 125/UN8.16/BS/2026

Bersama ini kami menerangkan bahwa Ringkasan bahasa Inggris dengan judul:

***“Implementation of Regional Government Credit Cards as a Cashless Payment
Instrument in Katingan Regency”*** yang disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Dian Retno Pertiwi
Nim : 2420333320014
Jurusan/Fakultas : S2 Akuntansi
Program : Pascasarjana

telah diverifikasi Bahasa Inggris yang digunakan sesuai dengan makna dari ringkasan yang ditulis oleh mahasiswa tersebut di atas. (Ringkasan terlampir)
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, July 15, 2026
Kepala,



Dr. Hj. Noor Eka Chandra, M.Pd
NIP. 197710232001122003

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 Maret 1992. Penulis menyelesaikan pendidikan menengah atas pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan pada Program Studi Akuntansi Universitas Lambung Mangkurat dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada tahun 2014.

Sejak tahun 2015, penulis bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Pada tahun 2024, penulis melanjutkan pendidikan pada Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat dan menyelesaikan pendidikan tersebut pada tahun 2026 dengan memperoleh gelar Magister Akuntansi (M.Ak.).

Banjarmasin, 6 Juli 2026

Dian Retno Pertiwi

HALAMAN DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN PERBAIKAN TESIS.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xvi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Konsep Pengelolaan Keuangan Daerah	11
2.1.1 Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD	12
2.1.2 Uang Persediaan (UP) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.....	13
2.2 Manajemen Kas Pemerintah.....	16

2.3 Digitalisasi Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah	17
2.4 Konsep Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah	18
2.4.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Transaksi Non Tunai	18
2.4.2 Landasan Kebijakan Nasional Transaksi Non Tunai	19
2.4.3 Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	21
2.5 Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai Instrumen Pembayaran Non Tunai.....	22
2.5.1 Ketentuan Subjek Pengguna KKPD.....	23
2.5.2 Ketentuan Objek Belanja KKPD	25
2.5.3 Ketentuan Mekanisme Penggunaan KKPD.....	27
2.5.4 Ketentuan Pengelolaan Uang Persediaan KKPD.....	29
2.5.5 Ketentuan Peran dan Tanggung Jawab	30
2.6 Model Implementasi Kebijakan Publik Edwards III	32
2.7 Teori Kelembagaan.....	36
2.7.1 Isomorfisme	37
2.7.2 Decoupling.....	39
2.8 Penelitian Terdahulu	41
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL.....	44
BAB IV METODE PENELITIAN.....	48
4.1 Ruang Lingkup Penelitian	48
4.2 Jenis Penelitian	48
4.3 Tempat dan Lokasi Penelitian	50
4.4 Unit Analisis	50
4.4.1 Informan	51

4.5 Teknik Pengumpulan Data	53
4.6 Pertimbangan Etis	53
4.7 Validitas dan Reliabilitas Data	54
4.8 Teknik Analisis Data.....	56
BAB V HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	60
5.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	60
5.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Katingan	60
5.1.2 Gambaran Umum Perangkat Daerah <i>Pilot Project</i> dan Informan Penelitian.....	63
5.1.3 Gambaran Umum Transaksi Non Tunai di Kabupaten Katingan	67
5.1.4 Gambaran Umum Implementasi KKPD di Kabupaten Katingan	75
5.2 Hasil dan Analisis Penelitian.....	83
5.2.1 Analisis Kesesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 tahun 2022.....	84
5.2.1.1 Implementasi Ketentuan Subjek Pengguna KKPD.....	84
5.2.1.2 Implementasi Ketentuan Objek Belanja KKPD	92
5.2.1.3 Implementasi Ketentuan Mekanisme Penggunaan KKPD...	104
5.2.1.4 Implementasi Ketentuan UP KKPD.....	112
5.2.1.5 Implementasi Ketentuan Peran dan Tanggung Jawab.....	119
5.2.2 Analisis Faktor Penghambat Implementasi KKPD	131
5.2.2.1 Dimensi Komunikasi (<i>Communication</i>).....	132
5.2.2.2 Dimensi Sumber Daya (<i>Resources</i>)	139
5.2.2.3 Dimensi Disposisi (<i>Disposition</i>).....	144
5.2.2.4 Dimensi Struktur Birokrasi (<i>Bureaucratic Structure</i>).....	152

5.2.2.5 Matriks Sintesis Hubungan Faktor Penghambat Implementasi KKPD.....	156
5.2.3 Interpretasi Temuan dalam Perspektif Teori Kelembagaan (<i>Institutional Theory</i>)	158
5.2.3.1 Isomorfisme	161
5.2.3.2 Decoupling.....	175
5.3 Implikasi Penelitian.....	180
5.4 Keterbatasan Penelitian	183
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	184
6.1 Kesimpulan.....	184
6.2 Saran.....	185
DAFTAR PUSTAKA	187
LAMPIRAN	

HALAMAN DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2. 1 Ringkasan Peran dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Implementasi KKPD.....	32
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu.....	41
Tabel 4. 1 Profil Informan.....	52
Tabel 5. 1 Daftar SKPD di Kabupaten Katingan.....	62
Tabel 5. 2 Perangkat Daerah Pilot Project dan Informan Penelitian	63
Tabel 5. 3 Tabel UP Perbulan Pilot Project KKPD Tahun 2026.....	66
Tabel 5. 4 Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Implementasi KKPD.....	77
Tabel 5. 5 Kondisi Implementasi KKPD pada Perangkat Daerah Pilot Project.....	82
Tabel 5. 6 Analisis Kesesuaian Subjek Pengguna KKPD.....	85
Tabel 5. 7 Administrator KKPD dan Jabatan Pengelolaan Keuangan Daerah	89
Tabel 5. 8 Daftar Pemegang dan Administrator KKPD.....	92
Tabel 5. 9 Analisis Kesesuaian Objek Belanja KKPD	93
Tabel 5. 10 Analisis Mekanisme Penggunaan KKPD	105
Tabel 5. 11 Daftar Surat Permohonan Penerbitan KKPD dari PPKD selaku BUD	107
Tabel 5. 12 Analisis Kesesuaian Pengelolaan UP KKPD.....	113
Tabel 5. 13 Alokasi UP Tunai dan UP KKPD Tahun 2026 pada OPD pilot project	115
Tabel 5. 14 Analisis Peran dan Tanggung Jawab	119
Tabel 5. 15 Matriks Hubungan Faktor Penghambat Implementasi KKPD.....	156

HALAMAN DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2. 1 Alur Implementasi KKPD Berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2022.....	28
Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual.....	47
Gambar 5. 1 Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Tengah.....	61